

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, May 2024, Halaman 475-481
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11236662)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236662>

Pembangunan Berbasis Perdesaan Melalui Pemekaran Wilayah Kabupaten Garut Selatan

Asep Dadang¹

¹STISIP Samudera Indonesia Selatan
Email: asepdadang11446@gmail.com

Abstrak

Salah satu konsep pembangunan dewasa ini adalah dengan cara menggunakan Otonomi Daerah (desentralisasi) melalui suatu kebijakan Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan ini mencoba bagaimana pembangunan yang didasarkan pada keinginan masyarakat, apakah masyarakat mampu dalam mengelola daerahnya dalam membangun atau sebaliknya. Pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) merupakan corak pembangunan yang demokratis dan menghidupkan suasana pembangunan di akar rumput. Dengan demikian, pola ini kiranya dapat mendongkrak berbagai masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, mewujudkan kearifan lokal, sehingga kedewasaan masyarakat dalam pembangunan akan terlihat dan member efek semakin kokohnya kesatuan dan persatuan.

Kata kunci: *Pembangunan, Masyarakat, Desa*

Abstract

One of the current development concepts is to use Regional Autonomy (decentralization) through policy Number 32 of 2004. This policy tries to determine how development is based on the wishes of the community, whether the community is capable of managing its area in development or vice versa. Community-based development (people centered development) is a democratic development model and enlivens the atmosphere of development at the grassroots. In this way, it is hoped that this pattern can improve various problems that occur among the community, realizing local wisdom, so that the maturity of the community in development will be visible and have the effect of strengthening unity and cohesion.

Keywords: *Development, Community, Village*

Article Info

Received date: 08 May 2024

Revised date: 12 May 2024

Accepted date: 20 May 2024

PENDAHULUAN

Strategi pembangunan dari waktu ke waktu telah banyak dilakukan oleh para pelaku pembangunan, tetapi masih belum mampu mensejajarkan harapan yang sesuai dengan keinginan bersama. Kebijakan public (*Public Policy*) yang telah dibuat pemerintah pusat untuk kepentingan pelayanan public (*Public service*) melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (*desentralisasi*) tentunya masih banyak yang belum menyelesaikan masalah. Salahsatu contohnya adalah dalam pelaksanaan administrasi public di tingkat daerah satu dan dua, ketika melaksanakan administrasinya belum bisa dilaksanakan secara sama dengan daerah lain misalnya isu pelaksanaan pemilihan Gubernur Yogyakarta begitu pula di daerah lain.

Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat adalah salahsatu wilayah administrasi nasional yang merupakan objek pembangunan nasional. Setiap tahun Kabupaten Garut mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintahan pusat. Tetapi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut masih belum bisa menyentuh masyarakat secara keseluruhan.

Ada beberapa factor penyebab yang mempengaruhi terhadap ketidaktahuan Kabupaten Garut diantaranya:

1. Geografis yang sangat luas 3.065,19 km²,
2. Jumlah penduduk yang sangat banyak sekitar 2.345.108 (2009) jiwa,
3. Jumlah kecamatan mencapai 42 kecamatan,
4. Jumlah desa 425 desa,
5. APBD 1,3 trilyun,
6. PAD hanya 6 persen,

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak strategis,
8. Krisis kepemimpinan seperti kasus KKN bupati dan anggota eksekutif lainnya dan banyak anggota DPRD yang terlibat,
9. Dan Sumber Daya Alam belum tergali.

Fakto-faktor itu menjadi masalah besar di Kabupaten Garut yang hari ini masih belum bisa terselesaikan secara keseluruhan, sehingga proses pelayanan public terabaikan dan konon terus melemah.

Dari beberapa faktor yang terjadi itu, pelaksanaan atau proses administrasi pemda Kabupaten Garut terjadi tidak harmonis, sehingga bisa berakibat terhadap lemahnya pelayanan public. Jangankan untuk kemajuan di daerah pedesaan yang jangkauan geografisnya sangat jauh, untuk pelayanan public di daerah perkotaan juga nyaris tidak terlayani.

Secara geografis untuk pemetaan wilayah Kabupaten Garut terbagi tiga kategori wilayah administrasi yaitu; wilayah Garut Utara, Garut Tengah dan Garut Selatan. Tetapi daerah yang sangat luas adalah Garut Selatan dua pertiga wilayah dari 3.065,19 km² berada di garut Selatan.

Garut Selatan memiliki jumlah 16 kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Banjarwangi
2. Kecamatan Singajaya
3. Kecamatan Peundey
4. Kecamatan Cihurip
5. Kecamatan Cisompet
6. Kecamatan Cibalong
7. Kecamatan Pameungpeuk
8. Kecamatan Cikelet
9. Kecamatan Pamulihan
10. Kecamatan Pakenjeng
11. Kecamatan Bungbulang
12. Kecamatan Mekarmukti
13. Kecamatan caringin
14. Kecamatan Cisewu
15. Kecamatan Talegong

Sedangkan jumlah kecamatan Garut Utara dan Garut Tengah sebanyak 27 kecamatan. Seperti dikemukakan pada alinea di atas, disamping Kabupeten Garut memiliki geografis yang sangat luas, juga pelaksanaan strategi pembangunannya belum mampu mendayagunakan potensi-potensi yang ada baik potensi SDM maupun SDA.

Disamping itu pula, keterbelakangan atau rendahnya IPM Kabupaten Garut dipengaruhi oleh keterbelakngan Garut Selatan, dan keterbelakangan Garut Selatan dipengaruhi jarak tempuh dari pusat pemerintahan sangat jauh dimulai jarak 30 KM (seperti kecamatan Cikajang) sampai jarak 150 KM (Kecamatan Talegong), sehingga kos para pejabat yang akan berkunjung ke Garut Selatan sangat besar, areal yang sngat luas dua pertiga ada di Garut Selatan, infrastruktur masih terbelakang khususnya jalan raya, gedung kesehatan dan gedung sekolah;

Sehingga dari faktor itu, Indek Pembangunan Manusia Garut selatan menjadi rendah, rendahnya nilai IPM itu (Garut Selatan) bisa mempengaruhi terhadap penghitungan secara keseluruhan nilai IPM Kabupaten Garut.

Dari fenomena itu, kiranya ada solusi untuk bagaimana Kabupaten Garut agar menjadi suatu kabupaten yang mampu mensejahterakan masyarakatnya, karena Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara aturan hukum berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

METODE

Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun alasan memilih metode ini karena masalah yang akan dianalisis dan dikaji menyangkut hal-hal yang berlangsung dalam kehidupan. Dengan deskripsi fenomena yang tampak dilapangan bisa ditafsirkan makna dan isinya yang lebih dalam dari data yang terhimpun dengan memperhatikan dan menjaga segi kualitasnya. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti diantaranya (1)

Observasi; (2) Informan; (3) Wawancara; dan (4) Studi Dokumentasi. Dengan harapan ketiga teknik ini bisa saling melengkapi serta menunjang dalam mendapatkan data yang diperlukan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi artinya bukan untuk menguji data yang semula jadi data awal, tetapi lebih mengembangkan pemahaman peneliti terhadap situasi dan kondisi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Banyak arti yang luas tentang pengertian istilah pembangunan, secara garis besarnya pembangunan terbagi dua yaitu pembangunan mental yaitu suatu pembangunan yang mengarah kepada tatanan kognitif dan afektif dan pembangunan fisik yaitu suatu pembangunan yang mengarah kepada tatanan psikomotorik (keterampilan).

Dari kedua istilah itu, jika disatukan mengandung kata pembangunan manusia (*human Development*) atau istilah lain pembangunan masyarakat (*community Development*). Istilah pembangunan masyarakat desa berkaitan dengan pembangunan berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat lokal, sebagai suatu kesatuan tindakan yang menusahakan perpaduan antara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang terorganisasi. Program ini diharapkan untuk mendorong dan mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer.

Di wilayah yang belum maju ekonominya, pada negara-negara agraris program ini merikan tekanan utama pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan perbaikan berbagai kondisi kehidupan dasar warga masyarakat, termasuk di dalamnya pemenuhan berbagai kebutuhan non material.

Ross dalam Iskandar (2005:134), pembangunan masyarakat (*Community Development*) yaitu suatu proses dimana suatu masyarakat berusaha untuk menemukan berbagai kebutuhan atau berbagai tujuan, kemudian mengatur atau menyusun kebutuhan dan tujuan tertentu, lalu mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tersebut, serta melaksanakan berbagai tindakan untuk itu semua, dengan cara memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek kooperatif dan kolaboratif diantara warga masyarakat.

Dari pendapat Ross tersebut ada beberapa istilah yang perlu diterjemahkan agar dapat terlihat mata arah:

1. Istilah “Proses” yaitu serangkaian tindakan warga masyarakat dimulai perencanaan hingga mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Artinya masyarakat melakukan suatu kegiatan-kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu sendiri,
2. Istilah “masyarakat” yaitu suatu komunitas manusia yang tinggal di suatu daerah dengan menggunakan suatu organisasi, memakai suatu aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri yang merupakan suatu panduan dasar untuk mengatur tatakehidupan,
3. Istilah “menentukan berbagai kebutuhan dan tujuan” yaitu menyusun berbagai kebutuhan baik kebutuhan primer dan sekunder dan mempunyai tujuan yaitu suatu keinginan sebagaimana layaknya manusia berakal,
4. Istilah “menyusun atau mengatur berbagai kebutuhan dan tujuan” adalah upaya untuk menentukan prioritas pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah masyarakat yang paling penting, mendasar, dan mendesak serta menyangkaut hajat hidup dan kepentingan masyarakat secara luas,
5. Istilah “penemuan sumber-sumber” adalah segala upaya untuk menemukan berbagai peralatan, orang-orang, teknik-teknik, dan bahan-bahan untuk mencapai harapan dan tujuan (dasolen dan desain),
6. Istilah “mengambil atau melaksanakan berbagai tindakan untuk itu semua” adalah serangkaian tindakan yang terencana, sistematis, yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan masyarakat,
7. Istilah “ memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek kooperatif dan kolaboratif” adalah membuat aksesibilitas tindakan dalam membuat pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Model-model Pembangunan Masyarakat

Dalam melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat terdapat beberapa teori yaitu model *Locality Development*, *Sosial Planing*, dan *Sosial Action*.

1. *Locality Development* adalah menekankan adanya perubahan masyarakat yang efektif sesuai dengan tujuan dan tindakan-tindakan yang ditetapkan bersama;
2. *Community Development* adalah suatu proses yang telah ditentukan atau dipolakan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk meningkatkan kondisi social dan ekonomi melalui partisipasi aktif mereka;
3. *Sosial Action* adalah ditujukan bagi sebagian masyarakat atau populasi yang tidak beruntung namun yang membubuhkan pengorganisasian dan barangkali sebagai analisa dengan yang lainnya untuk mengajukan permintaan-permintaan tuntutan masyarakat luas tentang sumber-sumber agar meningkat atau tersembuhkan sehingga sesuai dengan standar demokrasi atau keadilan social. Iskandar (2005).

Dari ketiga teori tersebut di atas, bahwa pembangunan suatu negara yang berpusat pada penguatan-penguatan masyarakat, baik pembangunan mental maupun pembangunan fisik adalah merupakan suatu pembangunan yang demokratis dan sesuai dengan pola pembangunan yang telah dibangun oleh Nabi Muhamad SAW. Nabi Muhamad SAW adalah salah tokoh dunia yang mampu melayani umat (public service) dengan memakai cara yang disebut *Al Imam Khodimul Ummah* (Pemimpin pelayan masyarakat). Dalam konsep konsep ini pola-pola yang dibangun oleh Nabi Muhamad adalah terbagi dua:

1. Kebijakan tentang kesejahteraan didahulukan bagi masyarakat, sedangkan kebutuhan para aparat dijadikan nomor dua
2. Kebijakan tentang keadilan hokum didahulukan bagi para pemimpin kenegaraan.

Dengan pola ini banyak para masyarakat Mekah dan Madinah yang merasa puas atas kepemimpinannya, dan banyak para pemimpin negara yang hidupnya sederhana bahkan hidup sealakadarnya. Dengan pola pembangunan berbasis kemasyarakatan ini efek sampingnya adalah terjadi keamanan, nyaman, dan harmonisasi antara pemimpin dengan masyarakat.

Begitu pula Corten dan Corner (1993:262) menyatakan konsep pembangunan pada masyarakat ini memandang kreatif, inisiatif dari masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan sepiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Selanjutnya Corten dan Corner mengemukakan tiga tema penting dalam melaksanakan pembangunan berpusat pada masyarakat:

1. Pendekatan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan mereka sendiri;
2. Kesadaran bahwa walaupun sector modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sector tradisional menjadi sumber utama merupakan sebagian besar bagi kehidupan rumah tangga miskin;
3. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya local.

Daerah Otonom Baru (DOB) salah satu solusi

Dari sekian konsep yang telah dikemukakan dan di bahas di atas, tentunya membutuhkan suatu kebijakan public (public police) yang memandang bahwa pelaksanaan administrasi public (public administration) harus mengacu dan standar sesuai dengan otonomi daerah. Karena otonomi daerah merupakan kedekatan dengan masyarakat dan sumber daya pembangunannya berasal dari masyarakat. Sehingga ketika pelaksanaan pembangunannya akan nyambung sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika konsep pembangunan berbasis masyarakat (People centered development) ini mau diterapkan bagi kelangsungan masyarakat Garut Selatan, salahsatunya Garut Selatan harus menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Karena konsep pembangunan ini memerlukan kedekatan para pemimpin dengan masyarakatnya, baik kedekatan emosional, hubungan secara individu, terutama dekat jarak tempuh agar cepat komunikasi fisik dengan masyarakat.

Tuntutan pemekaran ini merupakan strategi pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Garut Selatan khususnya umum tuntutan para pemimpin kenegaraan yang ada di Garut Selatan. Tuntutan ini telah disampaikan melalui sebuah organisasi:

1. Forum Pengkajian Pengembangan Garut Selatan yang disingkat FPPGS, yang anggotanya terdiri dari para tokoh ilmuwan, tokoh agama, para mahasiswa dan tokoh masyarakat. Tugas mereka mengkaji tentang Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tersedia di Garut Selatan,
2. Forum Organisasi Garut Selatan disingkat FOGS, forum ini menggabungkan beberapa organisasi masyarakat, baik organisasi LSM, maupun organisasi keagamaan seperti kesatuan para pembuka pesantren,
3. Forum Aliansi Mahasiswa Garut Selatan disingkat FORAMGAS, forum ini menampung para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang berasal dari masyarakat Garut Selatan,
4. Presidium Masyarakat Garut Selatan disingkat PMGS adalah gabungan pengurus dari FPPGS, FOGS, FORAMGAS yang merupakan suatu wadah untuk membuat agenda-agenda kegiatan cepatnya tujuan organisasi,
5. Komiteu Persiapan Pemekaran Kabupaten Garut Selatan disingkat KP2GS bertugas sebagai pelaksana kegiatan atau taktis kerja lapangan, sehingga forum ini mengawasi kegiatan yang dilakukan baik oleh legislative maupun eksekutif.

Dengan dibangunnya berbagai kegiatan organisasi oleh masyarakat Garut Selatan, sehingga dapat melahirkan:

1. Keputusan DPRD Kabupaten Garut nomor 4 tahun 2009 tentang persetujuan pemekaran wilayah
2. Keputusan Bupati Kabupaten Garut nomor 135/Kep.325-BAPPEDA/2009
3. Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat nomor 135/Kep.DPRD-1/2011
4. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 135/Kep. 288-otdaksm/2011
5. Berkas sekarang sudah ada di pemerintah pusat

Hasil kajian tentang DOB Garut Selatan

Konsep pembangunan berbasis masyarakat (*People centered development*) merupakan salahsatu strategi pembangunan atau teori pembangunan social kemasyarakatan dengan tujuan agar terwujud suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.

Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang desentralisasi merupakan suatu dasar hukum bagi pengembangan pembangunan berbasis masyarakat, maka masyarakat Garut Selatan melangkah untuk berbenah diri dalam hal pembangunan. Setelah dikaji oleh Lembaga Penelitian Universitas Padjjaran, maka hasil penilaiannya sangat layak dengan penjelasan sebagai berikut:

Latar Belakang

Penataan wilayah (*teritorial reform*) diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik. Rencana penataan wilayah di Kab. Garut melalui pembentukan DOB Kab Garut Selatan (KGS) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut. Sesuai dengan PP 78/2007, kelayakan pembentukan DOB KGS memerlukan Kajian Daerah yang meliputi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Metodologi Penilaian Faktor & Indikator

Fokus kajian ini adalah penilaian secara kuantitatif dan kualitatif terhadap persyaratan teknis yang meliputi 11 Faktor dan 35 Indikator. Faktor dan indikator yg dinilai menurut PP 78/2007 adalah:

Faktor	Indikator
Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk
Kemam-puan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB non migas per kapita 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Kontribusi PDRB non migas

Potensi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk 2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 3. Rasio pasar per 10.000 penduduk 4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 9. Persentase rumah tangga yg mempunyai kend bermotor/perahu/kapal motor 10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 12. Persentase pekerja yg berpend minimal SLTA thd pend usia 18 thn ke atas 13. Persentase pekerja yang berpend minimal S-1 thd pend usia 25 thn ke atas 14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.
Kemampuan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PDS 2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk 3. Rasio PDS terhadap PDRB non migas
Sosial budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk 2. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk 3. Jumlah balai pertemuan
Sosial politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih 2. Jumlah organisasi kemasyarakatan
Luas daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah keseluruhan 2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 2. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan
Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
Tingkat kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Manusia
Rentang kendali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten) 2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)

Kategori Kelulusan

Kategori	Total Nilai Indikator	Keterangan
-----------------	------------------------------	-------------------

Sangat mampu	420 s.d. 500	Rekomendasi
Mampu	340 s.d.419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s.d. 339	Ditolak
Tidak Mampu	180 s.d. 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 s.d. 179	Ditolak

Kategori Kelulusan Faktor Utama

Faktor Utama	Rentang Nilai	Nilai Minimal
Kependudukan	80—100	80
Kemampuan Ekonomi	60—75	60
Potensi Daerah	60—75	60
Kemampuan Keuangan	60—75	60
JUMLAH		260

SIMPULAN

Pembangunan yang berbasis masyarakat (*people centered development*) atau *community development* merupakan suatu cara pembangunan agar keterlibatan masyarakat lebih dewasa. Dengan memakai cara ini ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan diantaranya pembangunan ini akan membantu pada kepentingan setiap orang, baik kepentingan kemajuan pendidikan, ekonomi dan kesehatan, karena awal keinginan berasal dari aspirasi masyarakat yang biasanya di desa diadakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), masyarakat dengan sendirinya akan merasa dirinya diintegrasikan atau diikutsertakan dalam pembangunan, sehingga timbul dalam dirinya tanggung jawab (*responsibility*) dalam melindungi dan memajukan bangsa dan negara, akan terjadi harmonisasi antar kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat, pihak masyarakat akan merasa senang karena implementasi kebijakan pembangunan telah sesuai dengan keinginan sesuai dengan dengan keinginan masyarakat, begitu pula pihak pemerintah tidak akan merasa ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya karena tugas itu berasal dari aspirasi masyarakat.

REFERENSI

- Amin, Abdusy Syakur, (2004), *Manajemen Strategi*. Bandung: Insan Akademika
 Djatmiko, Yayat Hayati, (2002), *Prilaku Organisasi*. Bandung Alfabeta
 Dadang, Asep, (2009), *Manajemen SumberDaya Manusia*. (Bahan Kuliah Universitas Al-Ghifari)
 Fathoni, Abdurrahmat, (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rinjani
 Iskandar, Jusman, (2004), *Teori Sosial*. Bandung: Puspaga
 Iskandar, Jusman, (2004), *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-variabel dan Psikologi*. Bandung: Puspaga
 Saefullah, Djadja, (2010), *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*. Bandung: LP3AN FISIP Unpad